

**PENDAPAT DAN KATA AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
KEBUMEN**

Terhadap

**2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
tentang**

- 1. Bangungan Gedung; dan**
- 2. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan**



**Disampaikan Pada Hari Jum'at, 11 November 2022
Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen atau yang mewakilinya;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati dan Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;

Yth. Para Camat se- Kabupaten Kebumen;

Yth. Yang kami hormati segenap hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan, rekan – rekan wartawan baik cetak maupun elektronik, LSM serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang ikut mencermati Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada hari ini melalui radio IN-FM.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Pertama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rakhmat, taufik hidayah dan inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 11 November 2022, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka mendengarkan Pendapat dan Kata akhir Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang 1) Bangunan Gedung; dan 2) Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Sholawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi Agung *Muhammad Solallohu 'Alaihi Wassalam* sang penuntun kebajikan dalam mencapai maslahatil umah, dengan **Istiqomah, tetap Berkhidmat Membela Rakyat**. Teriring doa semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'at fidunya khatal akherat aminn...

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk mengawali sambutan ini izinkan kami menyampaikan terimakasih :

Pertama, Kepada Pimpinan Sidang, yang telah memeberikan kesempatan kepada kami membacakan Pendapat dan Kata Akhir Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang 1) Bangunan Gedung; 2) Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Yang *Kedua*, Kepada Saudara Bupati dan Jajaran eksekutif, terutama Tim Penyusun Raperda dari eksekutif.

Ketiga, kami memberi apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan Pansus, dan Para Tenaga Ahli Pansus yang mendampingi dan telah berjibaku dalam mengawal Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang 1) Bangunan Gedung; dan 2) Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sehingga bisa menjadi tata naskah regulasi yang baik untuk menjadi Peraturan Daerah nantinya.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Mengawali penyampaian Pendapat dan Kata akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Kami turut berduka yang mendalam atas bencana tanah longsor, banjir yang menimpa di beberapa desa di wilayah Kabupaten Kebumen. Beberapa hari ini curah hujan meningkat, yang mengakibatkan di berapa titik mengalami banjir dan tanah longsor. Kami prihatin dengan kejadian yang menimpa di beberapa desa di wialayah Kabupaten Kebumen. Kami

menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, dan tetap berjaga-jaga karena hujan bisa kapanpun datang. Pada masa pergantian musim ini, kami juga berharap agar masyarakat tetap menjaga kesehatan, karena pada fase pergantian musim ini, penyakit mudah menyerang kita. Kemudian, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam berkendara apalagi menghadapi musim penghujan, terutama kalau akan bepergian jauh, karena ada beberapa ruas jalan yang tengah pada tahap perbaikan karena rusak.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Yang pertama kami sampaikan Pendapat terkait dengan Raperda Bangunan Gedung.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang.

Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung,

setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi, perlu adanya penerapan yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat (muatan lokal) dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang telah ada.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua penyelenggaraan bangunan, baik pembangunan maupun pemanfaatan dalam wilayah Kabupaten Kebumen, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Kami dari FPKB hanya ingin menegaskan kembali seperti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Pansus, terkait dengan teknis dalam administrasi, kami mendorong untuk tidak berbelit dan tidak ribet, kami berharap nanti akan lebih mudah dan simple, apalagi di era yang serba digital ini.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Kedua, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Kami dari FPKB berpendapat bahwa sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat luas. Demi mencapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri agar mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan aturan perundang-undangan, pemerintah daerah sebagai daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengelola potensi penerimaan daerah yang muaranya digunakan untuk membiayai pengeluaran

daerah yang dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan daerah dari usaha perikanan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain : ketersediaan perangkat berupa peraturan daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan kemampuan sumber daya manusia sebagai aparat yang mempunyai tugas dan fungsi mengawal pelaksanaan aturan dimaksud. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil, sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin kesinambungan dan kelangsungan pemerintahan dimana pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan penerimaan khususnya PAD. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila aturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah perlu dibentuk sedemikian rupa dengan harapan peraturan daerah tersebut tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan

mampu diaplikasikan sesuai dengan kondisi kekinian yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah dalam memenuhi upaya pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Keberadaan regulasi ini, FPKB mengharapkan keseriusan pemerintah dalam mengaturnya, sehingga outputnya jelas dan sejalan dengan salah satu Fungsi dari APBD yaitu Sebagai Stabilisasi Ekonomi Daerah. Dan sejalan dengan visi Bupati Kebumen yang SEMARAK.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan melihat kondisi diatas, setelah melakukan pencermatan terhadap tahapan pembahasan Raperda, Rapat-rapat kerja Pansus yang diikuti juga oleh Anggota F-PKB serta pendapat masyarakat dalam acara *public hearing*, F-PKB menyimpulkan dan berpendapat dengan tetap teguh pada komitmen membela yang benar demi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Kebumen tercinta, serta rasa tanggungjawab terhadap tugas konstitusi yang harus dilaksanakan, seraya tetap memohon petunjuk dari ALLOH SWT dengan mengucap **"Bismillahirrokhmannirokhim"** Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat **'menerima dan menyetujui'** Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang **Bangunan Gedung**; dan **Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan**. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta untuk segera ditindaklanjuti dan dimintakan persetujuan serta pengesahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Semoga Allah SWT meridhoi dan selalu membimbing kita semua untuk berbuat lebih baik dan semoga keputusan ini akan menjadi sebuah keputusan yang memberi manfaat dan barokah untuk masyarakat kebumen pada umumnya.

Demikian pendapat dan kata akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wallohul Muwwafiiq Illa Aqwamithoriii

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Kebumen, 11 November 2022

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Ketua



**H. SAMAN HALIM
NURROHMAN**

Sekretaris



KHOTIMAH, S.Pd.I, MA